

BAB IV

GAMBARAN UMUM PEGADAIAN SYARIAH

UNIT HR. SOEBRANTAS PEKANBARU

A. Sejarah Pegadaian Syariah Unit Hr. Soebrantas Panam Pekanbaru

Pegadaian Syariah Unit Hr. Soebrantas pertama berlokasi di pandau permai pada tanggal 20 November 2008 yang kemudian pada tanggal 2 Januari 2011 dipindahkan ke jalan hr. Soebrantas km 10,5 panam yang ditetapkan berdasarkan keputusan pimpinan wilayah (kanwil) II, perum pegadaian syariah unit hr. Soebrantas pekanbaru no. 302/op 1.14001/2011, tentang pembukaan kantor cabang pegadaian syariah cabang hr. Soebrantas pekanbaru.

Berdasarkan keputusan direksi perum pegadaian nomor 84/LB.1.00/2011/ dikanwil II tentang pembukaan kantor cabang pegadaian syariah unit hr. Soebrantas panam pekanbaru menimbang dan menyatakan:⁴⁵

1. Dalam rangka menjawab kebutuhan sebagai konsumen muslim di Indonesia yang menginginkan transaksi pinjam meminjam yang sesuai syariat Islam, maka perum pegadaian sebagai lembaga yang bergerak di sektor usaha penyaluran pinjam perlu merespon tuntutan konsumen
2. Bahwa hasil penelitian dan pengamatan pasar yang dilakukan oleh team kantor wilayah di Pekanbaru, telah memenuhi persyaratan untuk mendirikan kantor unit pegadaian syariah di jalan hr Soebrantas km 10,5 panam Pekanbaru provinsi Riau

⁴⁵Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Soebrantas Panam Pekanbaru*, Tanggal 7 September 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bahwa pembukaan kantor unit pegadaian syariah tersebut perlu ditetapkan dengan keterangan surat direksi perum pegadaian.

Selanjutnya perum pegadaian syariah unit hr. Soebrantas memiliki UPT (usaha pegadaian syariah) yang berada dibawah pimpinan cabang tersebut yaitu Ups Sidomulyo, Ups Kubang Raya, Ups Tanah Merah, Ups Paus Ujung, Dan Ups Pasar Cik Puan.

B. Visi dan misi pegadaian syariah

Adapun visi pegadaian adalah :⁴⁶ sebagai solusi bisnis terpadu terutama berbasis gadai yang selalu menjadi market leader dan mikro berbasis fidusia selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat menengah kebawah. Sedangkan misi pegadaian syariah adalah :⁴⁷

1. Membantu progaram pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat khususnya golongan menengah kebawah dan melaksanakan usaha lain dalam rangka optimalisasi sumber daya perusahaan.
2. Memberikan pembiayaan yang tercepat, termudah, aman dan selalu memberikan pembinaan terhadap usaha golongan menengah kebawah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.
3. Memastikan pemerataan pelayanan dan infrastruktur yang memberikan kemudahan dan kenyamanan keseluruh pegadaian dalam mempersiapkan diri menjadi pemain regional dan tetap menjadi pilihan utama masyarakat.

⁴⁶Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Soebrantas Panam Pekanbaru*, Tanggal 7 September 2015.

⁴⁷Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Soebrantas Panam Pekanbaru*, Tanggal 7 September 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perjalanan misi perisahaan perum pegadaian : misi perum pegadaian sebagai suatu lembaga yang ikut meningkatkan perekonomian dengan cara memberikan uang pinjaman berdasarkan hukum gadai kepada masyarakat kecil, agar terhindar dari praktek pinjaman uang dengan bunga yang tidak wajar ditegaskan dalam keputusan menteri keuangan No.kep-39/MK/6/1/1971 tanggal 20 januari 1970 dengan tugas pokok sebagai berikut :⁴⁸

- a. Membina perekonomian rakyat kecil dengan menyalurkan kredit atas dasar hokum gadai kepada: para petani, nelayan, pedagang kecil, industri kecil yang bersifat produktif kaum buruh/ karyawan negri yang ekonomi lemah yang bersifat konsumtif.
- b. Ikut serta mencegah adanya pemberian pinjaman yang tidak wajar, pegadaian gelap, dan praktek riba lainnya.
- c. Disamping menyalurkan kredit maupun usaha lainnya yang bermanfaat terutama bagi pemerintah dan masyarakat.
- d. Membina pola pengkreditan supaya benar-benar terarah dan bermanfaat dan bila perlu memperluas daerah operasinya. Dengan seiring perubahan status perusahaan dari perjan menjadi perum pernyataan misi perusahaan dirumuskan kembali dengan pertimbangan jangan sampai misi perusahaan tiu justru membatasi ruang gerak perusahaan dan sasaran pasar tidak hanya masyarakat kecil dan golongan menengah saja maka terciptalan misi perusahaan perum pegadaian yaitu ikut membantu program pemerintah dalam upaya meningkatkan

⁴⁸Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Soebrantas Panam Pekanbaru*, Tanggal 7 September 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan masyarakat golongan menengah kebawah melalui kegiatan utama berupa penyaluran kredit gadai dan melakukan usaha lain yang menguntungkan.

Bertolak dari misi pegadaian tersebut dapat dikatakan bahwa sebenarnya pegadaian adalah sebuah lembaga dibidang keuangan yang mempunyai visi dan misi bagaimana masyarakat mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang adil dalam perekonomian.

C. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000, tentang Perusahaan Umum (PERUM) pegadaian bahwa “perum pegadaian dipimpin oleh seorang Direktur, yaitu Direktur Operasi dan Pengembangan, Direktur Keuangan, serta Direktur Umum yang seluruhnya berfungsi sebagai staf Direktur Utama.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas teknik operasional penyaluran uang pinjaman kepada masyarakat, dilakukan hubungan struktural teknis operasional dengan para pimpinan wilayah, serta pimpinan wilayah melakukan hubungan structural teknis operasional dengan para manajer kantor cabang.

Sesuai dengan struktural organisasi tersebut bentuk organisasi perum pegadaian adalah bentuk line dan staff ddengan tata kerja sebagai berikut :⁴⁹

- a. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugas operasionalnya bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah

⁴⁹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Soebrantas Panam Pekanbaru*, Tanggal 7 September 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab langsung kepada direktur utama.
- c. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari direktur utama dibantu oleh para direktur yang berfungsi sebagai staf direktur utama.
- d. Setiap pimpinan wilayah dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para manajer serta inspektur wilayah yang seluruhnya berfungsi sebagai staf pimpinan wilayah.
- e. Setiap manajer kantor cabang dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari dibantu oleh para asisten manajernya.

Unit layanan gadai syariah merupakan suatu unit cabang dari perum pegadaian yang berada dibawah binaan divisi usaha lain. Unit ini merupakan unit bisnis mandiri yang secara struktural terpisah pengelolaannya dari usaha gadai secara konvensional. Dengan adanya pemisahan ini, maka konsekuensinya perlu dibentuk kantor cabang yang terpisah dan mandiri dari usaha gadaisecara konvensional, namun masih dalam binaan pimpinan wilayah pegadaian sesuai dengan tempat kedudukan kantor cabang tersebut.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) yaitu badan independen yang ditempatkan oleh dewan syariah nasional, yang terdiri dari dibidang ahli dibidang fiqih muamalah dan memiliki pengetahuan dalam bidang perpegadaian. Adapun persyaratan anggota ditetapkan oleh dewan syariah nasional, dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dps wajib mengikuti fatwa dewan syariah nasional yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa produk dan jasa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi dan tugas DPS antara lain adalah sebagai berikut:⁵⁰

1. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah.
2. Sebagai mediator antara unit usaha syariah dan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran untuk mengembangkan produk dan jasa dari pegadaian yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
3. Sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada unit usaha syariah dan wajib melaporkan kegiatan usaha bagian gudang penaksiran kasir keamanan serta perkembangan unit usaha syariah yang diawasinya ke Dewan Syariah Nasional MUI.

Sedangkan fungsi Direksi antara lain adalah sebagai berikut :⁵¹

1. Sebagai tanggung jawab keberhasilan seluruh unit usaha bisnis perusahaan baik usaha inti maupun usaha non inti.
2. Sebagai penentu kebutuhan strategis sekaligus mengendalikan kegiatan bisnis agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan.

Fungsi general manager usaha lain dalam pembinaan unit layanan gadai syariah adalah pengatur kebijakan umum operasional gadai syariah dan mengintegrasikan kegiatan unit layanan gadai syariah dengan unit bisnis lain sehingga membentuk sinergi menguntungkan perusahaan.

⁵⁰Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Soebrantas Panam Pekanbaru*, Tanggal 7 September 2015.

⁵¹Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Soebrantas Panam Pekanbaru*, Tanggal 7 September 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Fungsi pimpinan wilayah dalam pembinaan unit layanan gadai syariah adalah bertanggung jawab dari mulai merintis pembukaan kantor cabang unit layanan gadai syariah, pembinaan operasional sehari-hari maupun penanganan administrasi keuangan seluruh kantor cabang gadai syariah di wilayah masing-masing.

Fungsi Manager Unit Layanan Gadai Syariah Pusat adalah :⁵²

1. Sebagai koordinator teknis pengoperasian unit layanan gadai syariah hingga sampai pembuatan laporan keuangan unit layanan gadai syariah konsolidasi se-indonesia.
2. Bertanggung jawab terhadap seluruh operasional unit layanan gadai syariah.
3. Membuat kebijakan serta petunjuk operasional yang wajib ditaati oleh pimpinan cabang unit layanan gadai syariah.

Fungsi manager kantor cabang unit layanan gadai syariah adalah sebagai berikut:⁵³

1. Sebagai pimpinan pelaksanaan teknis dari perusahaan yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Secara organisator manajer kantor cabang unit layanan gadai syariah bertanggung jawab langsung kepada pimpinan wilayah, selanjutnya pimpinan wilayah akan melaporkan hasil kegiatan binaannya kepada direksi. Sedangkan direksi akan membuat kebijakan pengelolaan unit layanan gadai

⁵²Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Soebrantas Panam Pekanbaru*, Tanggal 7 September 2015.

⁵³Dokumentasi, *Pegadaian Syariah Soebrantas Panam Pekanbaru*, Tanggal 7 September 2015.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syariah dan memberikan respon atau tindak lanjut atas laporan pimpinan wilayah dengan dibantu oleh jendral manager usaha lain dan manajer unit layanan gadai syariah pusat. Dalam melaksanakan fungsi tersebut diatas manajer kantor cabang mengkoordinasi kegiatan pelayanan peminjaman uang menggunakan prinsip atau akad rahn (gadai syariah), ijarah (sewa tempat) untuk penyimpanan barang jaminan.

2. Membantu kelancaran pelaksanaan tugas dikantor cabang unit pelayanan gadai syariah pimpinan cabang dibantu sejumlah karyawan dengan masing-masing bagian sebagai berikut :
 - a. Penaksir, bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.
 - b. Kasir, bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadai syariah.
 - c. Bagian gudang bertugas untuk melakukan pemeriksaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pengeluaran serta pembukuan marhun selain barang kantor sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam rangka ketetapan dan keamanan serta keutuhan marhun.

Adapun karyawan pegadaian syariah cabang HR. Soebrantas pekanbaru terdiri dari :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

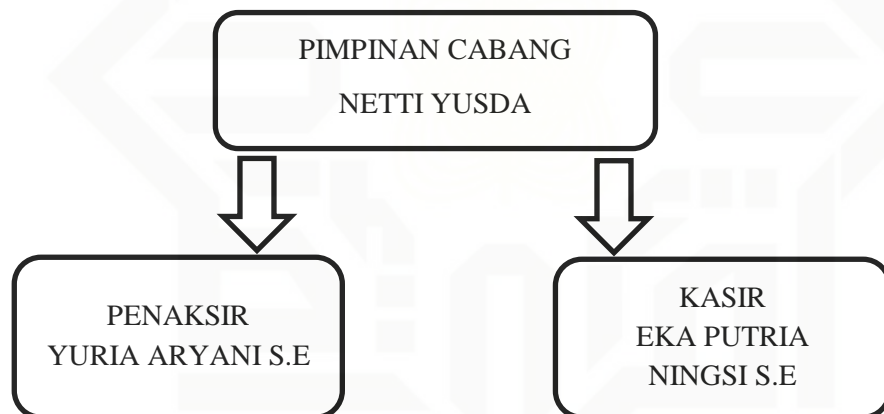
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Yuria Aryani, S.E
2. Eka Putria Ningsi, S.E

Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada PT. Pegadaian Syariah Cabang HR. Soebrantas Pekanbaru dapat dilihat pada gambar berikut ini :

Gambar 45

Struktur Organisasi Perum Pegadaian Syariah
Cabang Hr. Soebrantas Km. 10,5 Panam Pekanbaru.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penjelasan mengenai tugas masing-masing bagian pada perum pegadaian syariah cabang HR. soebrantas km. 10,5 panam pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Pimpinan cabang

1. Mengurus neraca kerja anggota berdasarkan acuan yang telah ditetapkan.
2. Merencanakan, mengorganisasikan, menyelenggarakan, mengendalikan operasional rahn, usaha, pembagian-pembagian tugas, penatausahaan barang jaminan bermasalah (taksiran tinggi, rusak, dan palsu), mengawasi barang jaminan, pengelolaan modal kerja, pemasaran dan pelelangan konsumen, serta penguasaan sarana dan prasarana.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pekerjaan bawahan.
4. Membimbing bawahan dalam rangka pembinaan pengamanan.
5. Menyelenggarakan penata usaha dan laporan kantor cabang pegadaian syariah dan UPS.

2. Penaksir

Bertugas menaksir barang jaminan untuk menentukan mutu dan nilai barang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam rangka mewujudkan penetapan taksiran dan uang pinjaman yang wajar serta citra baik perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kasir

Bertugas melakukan tugas penerimaan, penyimpanan, dan pembayaran serta pembelian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan operasional kantor cabang unit layanan gadai syariah.

